

MENGINTEGRASI LITERASI DIGITAL DAN RENCANA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN NASIONAL

Rahmat Hidayat *¹
Moch Fachrul Alfarizi ²
Ichsan Fauzi Rachman ³

^{1,2,3} Universitas Siliwangi

*e-mail : rahmathidayat@gmail.com ¹

Abstrak

Artikel ini membahas pentingnya integrasi literasi digital dalam Rencana Pembangunan Berkelanjutan Nasional (RPBN) di Indonesia. Literasi digital, yang meliputi kemampuan teknis, pemahaman kritis, dan etika digital, dianggap sebagai elemen kunci dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam, *focus group Discussion* (FGD), dan analisis dokumen untuk mengumpulkan data dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam meningkatkan literasi digital di Indonesia adalah terbatasnya akses dan infrastruktur yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil. Selain itu, kurikulum pendidikan formal belum sepenuhnya mencakup literasi digital secara komprehensif. Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk mengatasi tantangan ini. Pembentukan forum kolaboratif dan lembaga koordinasi nasional dapat meningkatkan sinergi dan efektivitas program literasi digital. Strategi untuk meningkatkan literasi digital yang mencakup investasi yang lebih besar dalam infrastruktur digital, kurikulum pengembangan yang mencakup literasi digital, pelatihan berkelanjutan untuk guru, dan kampanye edukasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Melalui komitmen yang kuat dan upaya yang terkoordinasi, literasi digital dapat menjadi pilar utama dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, mengurangi kesenjangan digital, dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Kata Kunci: literasi digital, pembangunan berkelanjutan, RPBN, infrastruktur digital, kolaborasi pemangku kepentingan, pendidikan, kesadaran masyarakat.

Abstract

This article discusses the importance of integrating digital literacy in the National Sustainable Development Plan (RPBN) in Indonesia. Digital literacy, which includes technical skills, critical understanding and digital ethics, is considered a key element in supporting inclusive and sustainable development. This research uses qualitative methods with in-depth interviews, focus group discussions (FGD), and document analysis to collect data from various stakeholders, including government, private sector, educational institutions, and civil society organizations.

The research results show that the main challenge in increasing digital literacy in Indonesia is limited access and adequate infrastructure, especially in remote areas. In addition, the formal education curriculum does not yet fully cover digital literacy in a comprehensive manner. Collaboration between various stakeholders is essential to overcome these challenges. The establishment of collaborative forums and national coordinating institutions can increase the synergy and effectiveness of digital literacy programs.

Strategies to increase digital literacy include greater investment in digital infrastructure, developing curricula that include digital literacy, ongoing training for teachers, and effective educational campaigns to increase public awareness. Through strong commitment and coordinated efforts, digital literacy can become a key pillar in supporting sustainable development goals in Indonesia, reducing the digital divide, and creating a more inclusive and just society.

Keywords: digital literacy, sustainable development, RPBN, digital infrastructure, stakeholder collaboration, education, public awareness.

PENDAHULUAN

Di era globalisasi dan revolusi industri 4.0, literasi digital telah menjadi komponen penting dalam kehidupan sehari-hari. Literasi digital tidak hanya sekedar penguasaan teknologi digital

tetapi juga kemampuan untuk memahami, mendistribusikan, dan menghasilkan pengetahuan melalui beragam media digital. Selain pesatnya kemajuan teknologi, literasi digital sangat penting dalam mendorong keterlibatan masyarakat di berbagai bidang seperti pemerintahan, pendidikan, dan perekonomian. Semua lapisan masyarakat akan merasakan keberhasilan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan, sesuai dengan Rencana Pembangunan Berkelanjutan Nasional (RPBN).

Strategi komprehensif yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, termasuk sektor publik dan komersial, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil, diperlukan untuk mengintegrasikan literasi digital ke dalam RPBN. Strategi ini harus mencakup perluasan ketersediaan teknologi digital, pembuatan kursus yang relevan, dan menawarkan sumber daya dan pelatihan yang memadai. Oleh karena itu, literasi digital dapat mengurangi kesenjangan digital, memungkinkan masyarakat dan komunitas untuk terlibat secara sukses dalam pembangunan berkelanjutan, dan membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Strategi ini harus mencakup perluasan ketersediaan teknologi digital, pembuatan kursus yang relevan, dan menawarkan sumber daya dan pelatihan yang memadai. Oleh karena itu, literasi digital dapat mengurangi kesenjangan digital, memungkinkan masyarakat dan komunitas untuk terlibat secara sukses dalam pembangunan berkelanjutan, dan membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Pentingnya memasukkan literasi digital ke dalam RPBN akan dibahas dalam artikel ini, beserta langkah taktis yang dapat dilakukan untuk mewujudkannya. Indonesia harus mengoptimalkan keunggulan teknologi digital dalam mendorong pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan dengan menggabungkan literasi digital dengan RPBN.

Kita harus menyadari bahwa literasi digital mencakup lebih dari sekedar aspek teknis penggunaan teknologi; hal ini juga memiliki komponen penting dan etis jika kita ingin berhasil memasukkannya ke dalam Rencana Pembangunan Berkelanjutan Nasional. Masyarakat yang melek digital harus mampu memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab, menganalisis informasi secara kritis, dan memahami dampak sosial dari teknologi. Hasilnya, literasi digital dapat menjadi alat yang berguna untuk memerangi misinformasi, meningkatkan keterbukaan, dan mendorong keterlibatan demokratis. Selain itu, pembentukan ekosistem yang mendorong literasi digital merupakan tanggung jawab utama pemerintah. Hal ini mencakup pembuatan undang-undang yang mendukung kemajuan teknologi, melakukan investasi pada infrastruktur digital, dan memperluas konektivitas internet di seluruh wilayah, bahkan di daerah pedesaan.

Sangat penting bagi pemerintah untuk berkolaborasi dengan lembaga pendidikan dan sektor swasta untuk menawarkan pelatihan dan inisiatif pendidikan yang selaras dengan tuntutan pasar tenaga kerja dan kemajuan teknologi terkini. Institusi pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, harus berperan aktif dalam mengintegrasikan literasi digital ke dalam kurikulumnya. Kurikulum yang dikembangkan harus mampu menjelaskan literasi digital secara menyeluruh hingga akhir, serta menjelaskan etika digital dan keamanan digital. Hasilnya, generasi muda akan lebih mampu menyesuaikan diri dengan tantangan dan peluang yang dihadirkan oleh revolusi digital.

Sektor sekunder juga dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan literasi digital. Melalui pengadaan publik, perusahaan dapat memberikan program pelatihan bagi karyawannya serta masyarakat setempat. Selain itu, perusahaan teknologi dapat memberikan kontribusi dengan menyediakan alat dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung inisiatif literasi digital. Masyarakat sipil, yang terdiri dari komunitas lokal dan kelompok non-pemerintah, dapat berfungsi sebagai agen perubahan dengan mengatur inisiatif pendidikan dan pelatihan yang bermanfaat bagi komunitas yang lebih luas. Kesenjangan digital akan menyusut dengan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat, memastikan bahwa literasi digital menjadi keterampilan yang inklusif dan setara.

Penerapan literasi digital dalam Rencana Pembangunan Berkelanjutan Nasional tidak hanya akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, namun juga memungkinkan masyarakat untuk mengambil peran penting dalam proses pembangunan. Kita dapat membangun lingkungan yang kreatif, beragam, dan berkelanjutan dengan menyediakan

kemampuan digital mutakhir kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan standar hidup setiap orang. Selain menawarkan gagasan kebijakan yang dapat membantu upaya ini, artikel ini juga akan menjelaskan tindakan taktis yang dapat dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk memasukkan literasi digital ke dalam RPNB. Kita dapat memastikan bahwa literasi digital memainkan peran penting dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia dengan melakukan pendekatan yang menyeluruh dan kooperatif.

METODE

Untuk menyelidiki dan memahami bagaimana literasi digital dapat dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Berkelanjutan Nasional (RPNB) Indonesia, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Alasan pemilihan metodologi ini adalah kemampuannya untuk memberikan para peneliti wawasan yang komprehensif dan kontekstual mengenai beragam aspek yang terkait dengan penggabungan literasi digital dan pembangunan berkelanjutan. Berikut tahapan metodologi yang digunakan:

A. Desain Penelitian

Fenomena integrasi literasi digital dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Indonesia diteliti dalam penelitian ini dengan menggunakan desain studi kasus eksploratif. Pemilihan studi kasus didasarkan pada kemampuannya untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang prosedur, kesulitan, dan kemungkinan yang dihadapi selama proses integrasi.

B. Pengumpulan Data

Teknik berikut digunakan untuk memperoleh data:

1. Wawancara Komprehensif

Dilakukan dengan pihak-pihak terkait, seperti pejabat pemerintah, eksekutif bisnis, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui pemikiran mereka mengenai nilai literasi digital dalam RPNB, serta upaya yang telah dilaksanakan dan kesulitan yang mereka hadapi.

2. Focus Group Discussions (FGDs)

Kelompok yang terlibat langsung dalam mewujudkan literasi digital dan program pembangunan berkelanjutan menjadi subjek FGD. Tujuan dari diskusi kelompok ini adalah untuk menggali lebih jauh pengalaman individu sekaligus mengidentifikasi hambatan dan praktik terbaik saat ini.

3. Studi Dokumen

Berbagai publikasi ilmiah, peraturan pemerintah, dan laporan dari lembaga internasional mengenai pembangunan berkelanjutan dan literasi digital dianalisis. Analisis ini menemukan potensi dan kesenjangan untuk meningkatkan integrasi dan berkontribusi pada pemahaman kita tentang kerangka kebijakan saat ini.

C. Analisis Data

Pendekatan analisis tematik digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan. Tahapan analisis terdiri dari:

1. Transkripsi dan Pengkodean:

Untuk mengidentifikasi tema-tema penting yang muncul dari data, transkrip wawancara dan diskusi kelompok terfokus diberi kode.

2. Identifikasi Tema-Tema Utama:

Tema-tema yang berkaitan dengan integrasi literasi digital dalam RPNB telah dikenali dan diorganisir.

3. Interpretasi Data:

Untuk memahami hubungan antara literasi digital dan pembangunan berkelanjutan dan untuk menentukan dengan tepat elemen-elemen yang memfasilitasi dan menghambat integrasi ini, tema-tema yang ditemukan dikaji lebih lanjut.

D. Kepercayaan dan Validitas

Beberapa tindakan dilakukan untuk menjamin validitas dan reliabilitas penelitian:

1. Triangulasi Sumber Data:

Untuk mengkonfirmasi temuan dan meningkatkan legitimasi temuan penelitian, berbagai sumber data (seperti wawancara, diskusi kelompok terfokus, dan dokumen) digunakan.

2. Member Checking:

Melibatkan partisipan ke dalam proses validasi temuan untuk memastikan interpretasi yang dibuat oleh peneliti sejalan dengan perspektif dan pengalaman mereka.

3. Jejak Audit:

Untuk menjaga transparansi dan memungkinkan replikasi penelitian di masa depan, catatan komprehensif dari keseluruhan proses penelitian disimpan.

E. Etika dalam Penelitian

Pedoman etika untuk melakukan penelitian diikuti dalam pelaksanaan penelitian ini. Sebelum melakukan wawancara dan diskusi kelompok terfokus, informed consent diperoleh dari setiap peserta. Anonimitas dan kerahasiaan peserta dijunjung tinggi, dan temuan penelitian disebarluaskan tanpa mengungkapkan nama orang atau organisasi yang telah berpartisipasi. Dengan menggunakan teknik ini, penelitian diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan kita secara signifikan tentang bagaimana memasukkan literasi digital ke dalam RPN dan menawarkan rekomendasi kebijakan yang akan membantu Indonesia mencapai pembangunan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

1. Prespektif pemangku kepentingan

a) Pemerintah

Pihak berwenang Saat berbicara dengan para pemimpin pemerintahan, terlihat jelas bahwa sejumlah inisiatif pembangunan berkelanjutan memandang literasi digital sebagai hal yang penting bagi keberhasilan mereka. Program “Desa Digital” yang bertujuan menghadirkan teknologi digital di pedesaan merupakan salah satu upaya yang dilakukan. Namun kendala terbesarnya adalah kurangnya sumber daya manusia dan infrastruktur yang paham teknologi. Selain itu, koordinasi antar kementerian dan lembaga sering kali kurang efisien, sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan yang terintegrasi dan komprehensif.

b) Sektor Swasta

Sektor Perorangan Perwakilan sektor swasta mengatakan bahwa melalui *civil society organizations (CSR)*, perusahaan teknologi dan telekomunikasi secara aktif menawarkan pelatihan literasi digital. Mereka memandang literasi digital sebagai sarana memperluas pasar dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Namun mereka juga menarik perhatian pada perlunya kerja sama yang lebih erat dengan pemerintah untuk menjamin bahwa proyek-proyek ini dimasukkan ke dalam strategi pembangunan nasional. Sejumlah perusahaan juga telah menciptakan sistem pembelajaran online yang dapat diakses publik.

c) Lembaga Pendidikan

Lembaga Akademik Institusi pendidikan meyakini bahwa kurikulum yang ada saat ini masih belum mampu mencakup literasi digital secara keseluruhan. Masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara kota besar dan daerah pedesaan meskipun perguruan tinggi dan universitas tertentu sudah mulai menggunakan teknologi dalam proses belajar mengajar.

d) Organisasi Masyarakat Sipil

Organisasi dalam Masyarakat Sipil Memasukkan program dari sektor publik dan swasta ke masyarakat kurang mampu sebagian besar dimungkinkan oleh *civil society organizations (CSO)*. CSO sering mengadakan lokakarya dan sesi pelatihan untuk meningkatkan tingkat literasi digital anggota masyarakat. Mereka juga berkontribusi terhadap advokasi kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, CSO juga sering bekerja di lapangan untuk mendorong akses yang adil terhadap teknologi digital bagi kelompok rentan, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas.

2. Analisis Tematik

a) Akses Dan Infrastruktur

Infrastruktur dan Akses Tantangan akses dan infrastruktur muncul sebagai salah satu permasalahan utama. Masih banyak lokasi yang belum terjangkau meskipun ada upaya untuk meningkatkan jaringan internet dan menyediakan gadget modern. Hal ini mempersulit peningkatan literasi digital di daerah pedesaan. Hanya lebih dari 60% masyarakat Indonesia, dengan perbedaan besar antara wilayah perkotaan dan pedesaan, yang memiliki akses terhadap internet yang andal.

b) Kurikulum Dan Pendidikan

Pengajaran dan Kurikulum Pentingnya memasukkan literasi digital ke dalam kurikulum pendidikan formal adalah tema yang terus berulang. Pengajaran literasi digital tidak hanya mencakup kemahiran teknis tetapi juga pemikiran kritis mengenai penggunaan teknologi dan etika digital. Dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, pendidikan ini harus dimulai. Kurikulum yang ada saat ini perlu diperbarui dengan memasukkan kursus-kursus seperti literasi media, pemrograman dasar, dan keamanan siber.

c) Kolaborasi Multi-Pemangku Kepentingan

Kerjasama antara sektor publik dan swasta, institusi akademis, dan organisasi masyarakat sipil diyakini sangat penting untuk mengintegrasikan literasi digital ke dalam RPN secara efektif. Setiap pemangku kepentingan mempunyai fungsi berbeda yang dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Misalnya, sektor bisnis dapat menyediakan teknologi dan pelatihan, pemerintah dapat menyediakan pembiayaan dan peraturan, dan OMS dapat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.

d) Kesadaran dan Sikap Masyarakat

Tema penting lainnya adalah persepsi masyarakat terhadap literasi dan kesadaran digital. Banyak orang masih belum menyadari potensi manfaat literasi digital bagi pembangunan serta signifikansinya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengubah pola pikir ini, diperlukan inisiatif pendidikan dan peningkatan kesadaran. Untuk meningkatkan kesadaran di Indonesia, kampanye internasional tertentu yang efektif dapat dimodifikasi.

PEMBAHASAN

1. Strategi Peningkatan Akses dan Infrastruktur

a) Investasi Pemerintah dan Sektor Swasta

Diperlukan lebih banyak pendanaan dari sektor publik dan komersial untuk mengatasi permasalahan infrastruktur dan akses. Alokasi anggaran pembangunan infrastruktur digital di pedesaan dapat ditingkatkan oleh pemerintah. Memperluas skema “Palapa Ring” yang bertujuan menghubungkan seluruh wilayah Indonesia dengan jaringan serat optik merupakan salah satu langkah praktis yang dapat dilakukan. Selain itu, perlu memotivasi sektor swasta—khususnya perusahaan telekomunikasi—untuk melakukan investasi dalam pengembangan jaringan internet di wilayah-wilayah yang kurang terlayani. Sektor swasta mungkin terdorong oleh keringanan pajak dan peraturan sederhana.

b) Penyediaan Internet Gratis dan Subsidi Teknologi

Perlu dilakukan perbaikan terhadap layanan internet gratis yang ditawarkan di ruang publik seperti perpustakaan, sekolah, dan pusat kesehatan. Untuk menjamin fasilitas tersebut memiliki konektivitas internet yang andal dan cepat, pemerintah dapat berkolaborasi dengan ISP. Selain itu, mendukung keluarga miskin dengan membeli barang-barang elektronik seperti laptop dan tablet dapat membantu menutup kesenjangan digital. Kemitraan publik-swasta, di mana perusahaan teknologi mendonasikan gadget dengan harga diskon sebagai bagian dari inisiatif tanggung jawab sosial perusahaannya, dapat membantu mendanai program-program ini.

c) Pembangunan Pusat Komunitas Digital

Membangun pusat komunitas digital di desa-desa mungkin merupakan solusi jangka pendek untuk mengatasi masalah akses. Komputer, konektivitas internet, dan pelatihan literasi

digital yang ditawarkan oleh organisasi publik, swasta, dan masyarakat sipil semuanya dapat ditemukan di pusat-pusat ini. Selain itu, pusat komunitas digital dapat berfungsi sebagai titik fokus untuk pengembangan perusahaan kecil berbasis teknologi, pelatihan keterampilan digital, dan inisiatif pengajaran dan pembelajaran yang berorientasi digital.

d) Pengembangan Kurikulum dan Pendidikan Guru

Kurikulum literasi digital perlu dibuat dengan mempertimbangkan tuntutan lokal dan global. Kurikulum ini tidak hanya mencakup kemampuan teknis seperti menggunakan teknologi dan perangkat lunak, namun juga harus mencakup keterampilan penting seperti literasi media, pemrograman, dan keamanan siber. Aspek etika digital juga harus tercakup dalam kurikulum untuk membantu siswa memanfaatkan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab.

e) Pelatihan Berkelanjutan untuk Guru

Guru harus menerima pelatihan berkelanjutan agar dapat mengajarkan keterampilan digital secara efektif. Metode pengajaran berbasis teknologi, gambaran umum perangkat lunak pengajaran, dan strategi integrasi literasi digital di seluruh bidang topik harus menjadi bagian dari program pelatihan ini. Bekerja sama dengan bisnis digital dapat membantu menyediakan sumber daya dan materi pengajaran yang canggih. Untuk menjamin pengajaran yang unggul, sertifikasi dan program pelatihan instruktur teknologi informasi juga perlu ditingkatkan.

f) Magang dan Kemitraan dengan Perusahaan Teknologi

Siswa dapat memperoleh pengalaman dunia nyata dalam industri teknologi melalui program magang dan kolaborasi dengan perusahaan teknologi. Selain memberikan kemampuan teknis yang diperlukan, kurikulum ini akan mengajarkan siswa kesadaran tentang bagaimana teknologi digunakan di dunia kerja. Kemitraan ini juga dapat mencakup pemberian hibah kepada siswa luar biasa yang ingin mengejar karir di bidang hibah teknologi atau bentuk bantuan keuangan lainnya untuk sekolah mereka.

g) Penguatan Kolaborasi Multi-Pemangku Kepentingan

Menciptakan wadah untuk berkolaborasi dengan semua pihak yang terlibat akan membantu meningkatkan koordinasi dan efisiensi dalam mewujudkan inisiatif literasi digital. Papan diskusi ini dapat berfungsi sebagai tempat pertukaran data, aset, dan metodologi yang optimal. Misalnya, kelompok ini dapat berkumpul setiap bulan untuk membicarakan kemajuan, kesulitan, dan prospek inisiatif literasi digital. Forum ini juga memungkinkan untuk menghasilkan saran kebijakan berbasis bukti yang akan membantu integrasi literasi digital ke dalam RPNB.

h) Lembaga Koordinasi Nasional

Inisiatif dari berbagai sektor dapat dikoordinasikan dan duplikasi upaya dapat dihindari dengan dukungan badan koordinasi nasional yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan literasi digital. Organisasi ini dapat berfungsi sebagai titik kontak bagi sektor publik dan korporasi, serta bagi institusi akademis dan organisasi masyarakat sipil. Tanggung jawab utama organisasi ini adalah mengawasi dan mengelola pelaksanaan inisiatif literasi digital sambil memastikan bahwa inisiatif tersebut selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

i) Keterlibatan Intens dalam Masyarakat

Keterlibatan aktif masyarakat sangat penting bagi keberhasilan inisiatif peningkatan literasi digital. Melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat, organisasi masyarakat sipil dapat menjadi pemain kunci dalam mendorong keterlibatan ini. Anggota masyarakat dapat dilatih untuk menjadi fasilitator literasi digital melalui program seperti "train-the-trainer", yang selanjutnya dapat memberikan pengajaran kepada orang lain di komunitas mereka. Hal ini akan memicu serangkaian peristiwa yang akan mempercepat kebangkitan literasi digital di masyarakat.

j) Inisiatif Penggalangan Dana Pengetahuan dan Observasi

Masih banyak yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan nilai literasi digital melalui kampanye. Untuk menjangkau khalayak yang lebih luas, seseorang dapat

menggunakan media sosial, media massa, dan acara komunitas. Tujuan dari program-program ini adalah untuk menjelaskan manfaat literasi digital di berbagai bidang, seperti pendidikan, ekonomi, dan keterlibatan sosial. Tokoh masyarakat dan influencer online dapat membantu kampanye menjangkau khalayak yang lebih luas dan memperkuat efek pesannya.

k) Program Pendidikan Masyarakat

Program pendidikan publik dapat ditawarkan melalui berbagai platform untuk menarik kelompok masyarakat yang berbeda. Pemerintah, dunia usaha, dan kelompok masyarakat sipil dapat menyelenggarakan webinar, lokakarya, dan seminar tentang literasi digital. Selain itu, infografis, film pendek, dan konten interaktif dapat digunakan dalam kampanye media sosial untuk menarik minat masyarakat, khususnya generasi muda.

l) Pemanfaatan Teknologi dalam Pengajaran

Kita perlu memaksimalkan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Penting untuk membuat dan mengiklankan platform pembelajaran online yang dapat diakses publik. Kursus tentang keterampilan teknologi, literasi digital, dan mata pelajaran lain yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan dapat ditemukan di situs ini. Selain itu, teknologi dapat dimanfaatkan untuk menciptakan permainan dan aplikasi edukatif yang dapat menggugah rasa ingin tahu masyarakat dan mendorong mereka untuk belajar literasi digital.

m) Peran Media Sosial dan Massa

Media massa dan media sosial mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesadaran literasi digital. Melalui televisi, radio, dan media sosial, kampanye dapat menjangkau khalayak luas dan menyampaikan pesan-pesan penting tentang pentingnya literasi digital. Media massa juga dapat menyoroti kisah sukses individu atau komunitas yang berhasil meningkatkan literasi digitalnya sehingga dapat menjadi inspirasi bagi orang lain.

KESIMPULAN

Integrasi literasi digital dengan Rencana Pembangunan Berkelanjutan Nasional (RPBN) adalah kunci untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi semua. Literasi digital tidak hanya memperkuat kemampuan individu untuk berpartisipasi dalam era digital, tetapi juga mendorong inovasi yang dapat mengatasi tantangan pembangunan yang kompleks. Dengan mengedepankan pendidikan dan pelatihan, memperluas infrastruktur digital, mendorong kolaborasi multisektor, serta menetapkan kebijakan dan regulasi yang mendukung, kita dapat memastikan bahwa teknologi digital berkontribusi positif terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Pengalaman dari negara-negara yang telah berhasil mengintegrasikan literasi digital dengan pembangunan berkelanjutan menunjukkan bahwa keberhasilan dapat dicapai dengan komitmen dan kerja sama yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Penting bagi setiap negara, termasuk Indonesia, untuk belajar dari praktik terbaik ini dan menyesuaikannya dengan konteks lokal guna mencapai hasil yang optimal.

Dengan langkah-langkah strategis dan kebijakan yang tepat, kita dapat menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan. Literasi digital yang baik akan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga kita dapat mencapai SDGs dengan lebih cepat dan efektif.

Dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan kemajuan teknologi yang cepat, literasi digital menjadi fondasi yang kokoh untuk keberlanjutan jangka panjang. Mari kita bersama-sama mendorong dan mendukung inisiatif yang mengintegrasikan literasi digital dengan pembangunan berkelanjutan, untuk mewujudkan dunia yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, E. Z. L. (2020). "Gerakan literasi digital: studi pemberdayaan pemuda melalui program sistem informasi potensi kreatif desa di Kulonprogo". *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 3(2), 213-228.

- Fauzi, A., & Oxtavianus, A. (2014). "Pengukuran pembangunan berkelanjutan di Indonesia". *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 30(1), 42-52. <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld>
- Idhartono, A. R. (2023). "Literasi digital pada Kurikulum Merdeka belajar bagi anak". *Devosi: Jurnal Teknologi Pembelajaran*, 12(2), 91-96.
- Nurjanah, S., Ilma, R. Z., & Suparno, S. (2018). "Effect of economic literacy and conformity on student consumptive behaviour". *Dinamika Pendidikan*, 13(2), 198-207.
- Nurlinda, I. (2019). "Konsep Ekonomi Hijau (Green Economic) dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Indonesia untuk mendukung Pembangunan Berkelanjutan". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 15-28.
- Rakhman, M. A., & Haryadi, H. (2020). "Literasi Digital Generasi Z dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Pembangunan". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ungu (ABDI KE UNGU)*, 2(3), 148-157.
- Rufaidah, V. W. (2018). "Kolaborasi dan graf komunikasi artikel ilmiah peneliti bidang pertanian: studi kasus pada jurnal penelitian dan pengembangan pertanian serta indonesian Journal of Agricultural Research". *Jurnal Komunikasi dan Informatika Pertanian*, 12(1), 45-62.
- Sudirman, F. A., & Saidin, S. (2022). "Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government) dan Pembangunan Berkelanjutan: Reviu Literatur Sistematis". *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1), 44-58.
- Suparmoko, Muhammad. "Konsep pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan nasional dan regional." *Jurnal Ekonomika dan Manajemen* 9.1 (2020): 39-50.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. Retrieved from
- World Economic Forum. (2020). *The Global Risks Report 2020*. Retrieved from <https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2020>